



Ritel Modern Vs Koperasi Desa Merah Putih, Mungkinkah?

Alvito Adiansyah, Caesar Khalifah, Celcia La Prita Minna, Figo Rudiansyah, Jihan Hasnah Hamidah, Livia Audy Salsabila, Radja Akmal Rabbani*, Vionita Shakila Maharani, Abdul Ghofur, Nanda Rizka Syafriani Nasution

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Pengembangan toko modern ke daerah pedesaan di Indonesia telah mengubah cara ekonomi lokal berjalan dan bagaimana masyarakat menghabiskan uangnya secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana berkembangnya toko modern memengaruhi perekonomian desa dan menilai sejauh mana program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berhasil dalam mendukung perekonomian yang didasarkan pada komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, literatur akademik, dan sumber media yang kredibel. Analisis dilakukan dengan cara naratif agar lebih memahami hubungan antara tindakan pemerintah, cara kerja pasar, dan kondisi ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya toko ritel modern, seperti minimarket, telah mengubah cara masyarakat Desa belanja, membuat mereka lebih mengutamakan efisiensi dan kenyamanan, sekaligus membuat mereka lebih bergantung pada jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan besar. Di sisi lain, penerapan KDMP masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga manusia, partisipasi masyarakat yang rendah, serta ada tanda-tanda praktik patronase dalam proses pengelolaannya. Selain itu, kebijakan pembatasan pertumbuhan toko modern bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar dan munculnya bisnis dominan yang justru mengurangi persaingan di antara para pengusaha. Secara singkat, meskipun KDMP memiliki kemungkinan untuk memperkuat perekonomian desa, keberhasilannya sangat tergantung pada peningkatan pengelolaan, penguatan kemampuan lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa perbaikan tersebut, KDMP berisiko tidak mampu bersaing secara efektif dalam ritel modern dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam struktur ekonomi pedesaan.

Kata Kunci: Ritel Modern, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ekonomi Desa

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4059>

*Correspondence: Radja Akmal Rabbani

Email:

2410413110@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 02-03-2026

Accepted: 02-04-2026

Published: 02-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The expansion of modern retail stores into rural areas in Indonesia has significantly transformed local economic dynamics and the way communities spend their money. This study aims to examine how the growth of modern retail affects rural economies and to evaluate the extent to which the Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) program succeeds in supporting a community-based economic system. The research employs a qualitative descriptive approach using secondary data from policy documents, academic literature, and credible media sources. The analysis is conducted narratively to better understand the relationship between government actions, market mechanisms, and local economic conditions. The findings indicate that the expansion of modern retail, such as minimarkets, has altered rural consumption patterns, leading people to prioritize efficiency and convenience while increasing their dependence on corporate distribution networks. On the other hand, the implementation of KDMP still faces several challenges, including limited human resources, low community participation, and indications of patronage practices in its management. Furthermore, policies restricting the growth of modern retail may lead to market imbalances and the emergence of dominant businesses that reduce competition among economic actors. In conclusion, although KDMP has the potential to strengthen rural economies, its success largely depends on improved governance, enhanced institutional capacity, and active community participation. Without these improvements, KDMP risks being unable to compete effectively with modern retail and may even create new problems within the rural economic structure.

Keywords: Modern Retail, Government Intervention, Rural Economy

Pendahuluan

Gap Penelitian

Sektor perdagangan ritel Indonesia telah mengalami transformasi struktural yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Ekspansi jaringan minimarket modern, khususnya Alfamart (PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) dan Indomaret (PT Indoritel Makmur Internasional Tbk), tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan, melainkan telah merambah hingga ke wilayah pinggiran dan pedesaan. Minimarket modern menawarkan sejumlah keunggulan komparatif yang sulit ditandingi oleh usaha ritel tradisional, di antaranya sistem manajemen yang terstandarisasi, jaringan distribusi yang luas, harga yang transparan, serta jam operasional yang lebih panjang (Gunawan, Wiguna, and Purnama, 2022). Keunggulan-keunggulan ini mendorong pergeseran perilaku konsumsi masyarakat desa, yang semula mengandalkan warung kelontong dan toko tradisional sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kini secara bertahap beralih ke gerai minimarket modern. Pergeseran tersebut bukan sekadar persoalan preferensi belanja, melainkan mencerminkan perubahan mendasar dalam arsitektur ekonomi lokal yang semakin terintegrasi dengan logika pasar modern.

Dampak dari masuknya ritel modern ke wilayah pedesaan telah menjadi perhatian serius dalam kajian ekonomi pembangunan. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat bahwa sejak masuknya ritel modern ke desa sekitar tahun 2015 hingga tahun 2025, terdapat sekitar 2,2 juta warung kelontong yang terkikis, sehingga jumlahnya kini tersisa hanya 3,9 juta unit di seluruh Indonesia. Berbagai penelitian akademis turut memperkuat temuan ini. Reardon dan Hopkins menunjukkan bahwa revolusi supermarket di negara-negara berkembang secara konsisten berdampak pada penurunan pangsa pasar pedagang tradisional, terutama dalam segmen produk kebutuhan sehari-hari (Reardon and Hopkins, 2006). Dalam konteks Indonesia, (Ade and Fatimah, 2025) mengonfirmasi bahwa keberadaan ritel modern berdampak langsung terhadap penurunan keuntungan dan pendapatan usaha ritel tradisional di sekitarnya, sementara Nurjannah dan Wisudawaty menyoroti urgensi penguatan literasi keuangan para pedagang kelontong sebagai respons adaptif terhadap tekanan persaingan tersebut (Nurjannah, 2025). Penelitian-penelitian ini secara kolektif menunjukkan bahwa kehadiran minimarket modern tidak bersifat netral, melainkan membawa implikasi redistributif yang nyata terhadap struktur pendapatan masyarakat desa.

Di sisi lain, sistem perekonomian nasional Indonesia secara konstitusional menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sebuah prinsip yang secara filosofis sejalan dengan semangat koperasi. Dalam tradisi pemikiran ekonomi Indonesia, Mohammad Hatta telah lama memandang koperasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan mendorong kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam hal tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia, dengan tujuh jenis unit usaha yang mencakup apotek, klinik, unit simpan pinjam, pengadaan sembako, pergudangan atau cold storage, logistik desa, dan kantor koperasi. Dari sisi pembiayaan, pemerintah memberikan dukungan likuiditas melalui penempatan dana APBN di bank-bank BUMN (Himbara), yang memungkinkan koperasi mengakses pinjaman dengan suku bunga rendah sebesar enam persen

Program KDMP hadir dalam konteks polemik kebijakan yang tajam. Menteri Koperasi Ferry Juliantono secara terbuka meminta Alfamart dan Indomaret menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan, dengan alasan bahwa dominasi ritel modern di desa berperan sebagai "penyedot" likuiditas lokal ke arah pusat, sehingga menghambat perputaran ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menutup gerai yang sudah beroperasi, melainkan hanya menghentikan pemberian izin ekspansi baru di wilayah desa. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berpendirian bahwa operasional gerai ritel modern seluruhnya berlandaskan regulasi yang berlaku dan menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan daerah merupakan prinsip utama yang dipegang teguh oleh para anggotanya. Polemik ini mencerminkan ketegangan yang lebih dalam antara logika perlindungan ekonomi kerakyatan dan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam suatu sistem pasar terbuka (Rusno, 2008)

Kajian pustaka yang ada mengungkap dua hipotesis yang saling berseberangan mengenai prospek KDMP. Hipotesis optimis berpandangan bahwa koperasi berbasis komunitas memiliki keunggulan inheren dalam mendistribusikan surplus ekonomi secara lebih merata kepada anggotanya, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan koperasi ritel NTUC FairPrice di Singapura yang menguasai sekitar 64 persen pangsa pasar ritel nasional (Editor Indonesia, 2026). Dalam perspektif ini, KDMP berpotensi menjadi koreksi struktural atas konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan di tangan korporasi swasta. Sebaliknya, hipotesis pesimis mengingatkan pada rekam jejak program serupa di masa lampau, terutama Koperasi Unit Desa (KUD) era Orde Baru yang pada akhirnya banyak kolaps akibat lemahnya tata kelola, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, dan praktik patronase di tingkat lokal. Dalam konteks KDMP, relasi kekuasaan berbasis kekerabatan dan jaringan patronase di tingkat desa berpotensi mewarnai proses rekrutmen pengurus koperasi, sehingga membuka risiko nepotisme yang dapat menggerogoti profesionalitas dan akuntabilitas lembaga (Aspinall et al. 2020). Intervensi negara dalam mekanisme pasar apabila tidak disertai pengawasan yang memadai, berpotensi melahirkan bentuk dominasi pasar baru yang tidak kalah bermasalah dari dominasi korporasi yang coba digantinya (Hadiz, 2010). Risiko ini diperparah oleh kenyataan bahwa kegagalan delapan koperasi bermasalah dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kerugian mencapai Rp26 triliun, yang berdampak buruk terhadap citra koperasi secara nasional sebuah warisan yang berpotensi diperparah apabila KDMP tidak dikelola dengan baik.

Meski fenomena ini memiliki relevansi politik dan ekonomi yang signifikan, kajian akademik yang secara sistematis menganalisis dinamika persaingan antara jaringan minimarket modern dan koperasi desa berbasis kebijakan negara di Indonesia masih sangat terbatas. Studi-studi terdahulu umumnya membahas dampak ritel modern terhadap pedagang tradisional ((Reardon & Hopkins, 2006), tata kelola koperasi secara umum, ataupun politik lokal di tingkat desa (Aspinall et al. 2020), namun belum ada yang secara komprehensif menjawab pertanyaan sentral: apakah wacana kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern justru akan menciptakan bentuk monopoli baru di bawah bendera negara, dan apakah KDMP mampu bersaing secara organik ataukah hanya dapat bertahan karena kompetitornya diikat oleh regulasi?

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, ekspansi ritel modern di pedesaan tidak hanya mengubah pola konsumsi, tetapi juga menggeser struktur rantai pasok lokal. Kehadiran minimarket dengan sistem distribusi terintegrasi membuat produk-produk dari pemasok besar dan nasional lebih mudah masuk ke desa, sementara produk lokal sering kali kesulitan menembus jaringan tersebut. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa ritel modern tidak sekadar bersaing di tingkat hilir, tetapi juga membentuk ulang relasi produksi dan distribusi di tingkat hulu. Akibatnya, pelaku usaha kecil di desa tidak hanya kehilangan pasar, tetapi juga kehilangan akses terhadap jaringan distribusi yang semakin tersentralisasi (Reardon & Timmer, 2012)

Kalau dilihat dari perspektif kelembagaan, koperasi desa seperti KDMP sebenarnya memiliki peluang untuk mengisi celah yang tidak mampu dijangkau oleh ritel modern, terutama dalam membangun keterkaitan ekonomi lokal. Koperasi dapat berperan sebagai agregator produk-produk masyarakat desa, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang lebih tertutup dan berputar di tingkat lokal. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada kapasitas manajerial dan desain kelembagaan yang adaptif. Koperasi yang berhasil bukan hanya yang berbasis komunitas, tetapi juga yang mampu mengadopsi praktik manajemen modern tanpa kehilangan prinsip partisipatifnya (Reardon & Timmer, 2012)

Di sisi lain, dinamika persaingan antara ritel modern dan koperasi desa juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang mengatur pasar. Kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern di pedesaan berpotensi menciptakan ruang bagi koperasi untuk tumbuh, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan risiko distorsi pasar. Dalam teori ekonomi politik, intervensi negara yang terlalu protektif dapat mengurangi insentif efisiensi dan inovasi, sehingga pelaku usaha yang dilindungi cenderung bergantung pada kebijakan, bukan pada daya saingnya sendiri (Stiglitz, 2010). Dalam konteks ini, KDMP menghadapi tantangan ganda: di satu sisi harus dilindungi pada fase awal, tetapi di sisi lain juga harus didorong untuk mandiri dalam jangka panjang.

Lebih jauh lagi, konteks sosial-politik di tingkat desa turut menentukan arah perkembangan KDMP. Relasi antara pemerintah desa, elite lokal, dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah koperasi akan benar-benar menjadi instrumen ekonomi kolektif atau justru menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Penelitian oleh Aspinall dan Berenschot menunjukkan bahwa praktik patronase di tingkat lokal sering kali mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi, termasuk dalam pengelolaan lembaga

berbasis komunitas (Aspinall et al. 2020). Oleh karena itu, tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, terdapat risiko bahwa KDMP hanya akan mereproduksi ketimpangan yang sudah ada, alih-alih mengatasinya.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak wacana kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern terhadap struktur pasar di pedesaan, sekaligus mengevaluasi sejauh mana ambisi pemerintah melalui program KDMP berpotensi menciptakan monopoli baru yang sekadar menggeser dominasi swasta menjadi dominasi negara. Dengan memetakan relasi antara kebijakan negara, mekanisme pasar, dan struktur kekuasaan di tingkat lokal, penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan KDMP tidak semata-mata ditentukan oleh proteksi regulasi, melainkan sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan, transparansi, dan kemampuan koperasi untuk bersaing secara substantif bukan sekadar administratif dengan pelaku ritel modern yang telah lebih dulu berakar kuat di tengah masyarakat desa Indonesia.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji dampak ekspansi ritel modern terhadap pelaku usaha tradisional serta membahas tata kelola koperasi dalam konteks yang lebih umum, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan terkait analisis integratif antara kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern dan kemunculan koperasi desa berbasis intervensi negara seperti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Studi sebelumnya cenderung memisahkan antara analisis pasar ritel modern (Reardon & Hopkins, 2006) dan kajian kelembagaan koperasi atau politik lokal (Aspinall et al. 2020), sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana interaksi antara kebijakan proteksionis negara, struktur pasar, dan dinamika kekuasaan lokal membentuk konfigurasi ekonomi baru di pedesaan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara kritis menguji apakah intervensi negara melalui pembatasan pasar dan pembentukan koperasi justru berpotensi menciptakan distorsi pasar atau bentuk monopoli baru yang terselubung (Stiglitz, 2010).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk (1) menganalisis dampak kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern terhadap struktur persaingan dan distribusi ekonomi di tingkat desa, (2) mengevaluasi kapasitas kelembagaan dan daya saing KDMP dalam menghadapi dominasi ritel modern, serta (3) mengidentifikasi potensi munculnya dominasi pasar baru yang bersumber dari intervensi negara. Adapun signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur ekonomi politik pembangunan, khususnya dalam memahami relasi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam konteks transformasi ekonomi pedesaan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih seimbang antara perlindungan ekonomi kerakyatan dan penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga intervensi negara tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kelembagaan ekonomi lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis rencana pembatasan ekspansi ritel modern dan proyeksi penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Sejalan dengan pandangan (Sugiyono, 2013.) pendekatan kualitatif diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait pergeseran struktur pasar dan motif di balik kebijakan yang sedang dirancang. Melalui metode ini, penelitian berupaya membedah secara objektif potensi perpindahan kekuasaan ekonomi dari dominasi korporasi besar menuju jaringan distribusi yang dikelola oleh negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan mengandalkan sumber-sumber sekunder dari internet. Peneliti menghimpun naskah kebijakan, pernyataan otoritas publik, serta laporan riset terdahulu mengenai tata kelola desa dan persaingan usaha. Data digital tersebut kemudian diolah untuk mengevaluasi apakah pembatasan kompetisi ini akan benar-benar menguntungkan masyarakat desa atau sekadar menjadi langkah strategis untuk mengambil alih jalur distribusi retail melalui bendera koperasi.

Analisis data dilakukan secara naratif untuk memetakan bagaimana regulasi negara berpotensi membentuk struktur monopoli baru di pedesaan. Peneliti melakukan penyaringan data guna melihat apakah model koperasi yang diusulkan mampu bersaing secara organik atau hanya mengandalkan intervensi aturan untuk menyingkirkan kompetitor. Untuk menjaga objektivitas, dilakukan pengecekan silang antar sumber data publik guna memastikan bahwa analisis yang dihasilkan tetap akurat dan transparan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di ruang digital.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum Kondisi Ritel Modern di Pedesaan

Perkembangan ritel modern di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren ekspansi yang cukup signifikan, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga hingga ke pedesaan. Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret telah memperluas jangkauan operasionalnya ke desa-desa, yang sebelumnya didominasi oleh warung kelontong dan pasar tradisional. Ekspansi ini mencerminkan perubahan struktur distribusi barang yang semakin terintegrasi dengan sistem pasar modern, di mana korporasi ritel memiliki peran yang semakin dominan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari (Gunawan, Wiguna, & Purnama, 2022)

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep “revolusi supermarket” yang banyak terjadi di negara berkembang, di mana ritel modern secara bertahap menggantikan fungsi ritel tradisional dalam sistem distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Ritel modern mampu menawarkan efisiensi distribusi, stabilitas harga, serta variasi produk yang lebih luas dibandingkan pelaku usaha kecil. Penjelasan lebih lanjut mengenai fenomena ini dapat diakses melalui (Reardon & Hopkins, 2006)

Selain faktor efisiensi, daya tarik ritel modern juga terletak pada aspek kenyamanan dan pengalaman berbelanja. Minimarket menyediakan fasilitas seperti tata ruang yang rapi,

pendingin ruangan, serta sistem pembayaran yang lebih modern, termasuk pembayaran digital. Kondisi ini membuat ritel modern lebih unggul dalam memenuhi preferensi konsumen yang semakin mengutamakan kepraktisan dan kenyamanan dalam berbelanja. Bahkan, beberapa laporan media menunjukkan bahwa masyarakat desa mulai menjadikan minimarket sebagai pilihan utama dibandingkan warung tradisional .

Dari sisi ekonomi, ekspansi ritel modern juga membawa perubahan dalam struktur rantai pasok di pedesaan. Produk yang dijual di minimarket umumnya berasal dari pemasok besar dan nasional, sehingga memperkuat integrasi desa ke dalam jaringan distribusi yang lebih luas. Namun, kondisi ini juga berpotensi melemahkan peran distributor lokal serta pelaku usaha kecil yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran ritel modern tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga struktural dalam mengubah relasi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, ekspansi ritel modern ke pedesaan tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis perusahaan yang melihat desa sebagai pasar baru yang potensial. Dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang terus meningkat, wilayah pedesaan menjadi target ekspansi yang menjanjikan bagi korporasi ritel. Hal ini diperkuat oleh berbagai laporan ekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ritel modern di Indonesia masih akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.

Dengan demikian, kondisi ritel modern di pedesaan tidak hanya mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga membawa perubahan struktural dalam sistem ekonomi lokal. Kehadirannya tidak sekadar menambah pilihan bagi konsumen, tetapi juga mengubah pola distribusi, relasi ekonomi, serta dinamika pasar di tingkat desa.

Ekspansi Minimarket dan Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Ekspansi minimarket ke wilayah pedesaan tidak hanya berdampak pada struktur pasar, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Kehadiran ritel modern membuat masyarakat desa memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis produk, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang konsumsi modern. Hal ini menyebabkan pergeseran dari pola konsumsi tradisional yang berbasis kebutuhan sehari-hari menjadi pola konsumsi yang lebih variatif dan berorientasi pada kenyamanan (Reardon & Timmer, 2012)

Perubahan pola konsumsi ini juga terlihat dari meningkatnya preferensi masyarakat untuk berbelanja di minimarket dibandingkan warung tradisional. Minimarket menawarkan harga yang transparan, promosi rutin seperti diskon dan bundling, serta pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Faktor-faktor ini mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk beralih ke ritel modern sebagai pilihan utama. Fenomena ini juga tercermin dalam berbagai laporan media yang menunjukkan meningkatnya penetrasi ritel modern di luar kota besar.

Selain itu, ekspansi minimarket turut mengubah cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika sebelumnya masyarakat cenderung membeli barang dalam jumlah kecil dan secara bertahap di warung terdekat, kini mereka mulai melakukan pembelian dalam jumlah lebih besar sekaligus di minimarket. Pola ini menunjukkan adanya

perubahan dalam manajemen konsumsi rumah tangga yang semakin terorganisir dan terencana.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya ketergantungan terhadap ritel modern. Dengan semakin dominannya minimarket dalam sistem distribusi barang, masyarakat desa menjadi lebih bergantung pada jaringan distribusi besar yang dikendalikan oleh korporasi. Hal ini berpotensi mengurangi kemandirian ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya berperan sebagai penyedia utama kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, perubahan pola konsumsi ini juga berkaitan dengan transformasi sosial yang lebih luas. Masyarakat desa, khususnya generasi muda, mulai mengadopsi gaya hidup yang lebih modern dan praktis. Belanja di minimarket tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang mencerminkan modernitas. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi ritel modern tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk nilai dan preferensi sosial masyarakat (A. Gunawan, Prasetyo, & Hidayat, 2022)

Dengan demikian, ekspansi minimarket ke pedesaan telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang cukup signifikan. Perubahan ini mencerminkan integrasi ekonomi desa ke dalam sistem pasar modern, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran nilai dan perilaku konsumsi yang semakin mengarah pada efisiensi, kenyamanan, dan gaya hidup modern.

Kemunculan dan Permasalahan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) muncul sebagai respons pemerintah terhadap semakin kuatnya dominasi ritel modern di wilayah pedesaan. Program ini secara resmi didorong melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan koperasi di berbagai desa sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas. Pemerintah memosisikan KDMP sebagai alternatif distribusi barang dan penggerak ekonomi desa yang mampu menandingi kekuatan ritel modern (Kurniawan, 2025).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KDMP di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi. Banyak koperasi dibentuk secara cepat tanpa diiringi dengan peningkatan kapasitas manajerial yang memadai, sehingga operasionalnya tidak berjalan optimal. Hal ini juga diakui dalam laporan media yang menyebutkan bahwa koperasi desa masih membutuhkan penguatan SDM agar dapat berfungsi secara efektif (Saptati, 2025)

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pola rekrutmen pengelola koperasi yang cenderung tidak berbasis merit. Dalam praktiknya, banyak posisi dalam KDMP diisi oleh perangkat desa atau individu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan praktik patronase yang masih kuat di tingkat lokal, di mana distribusi posisi lebih ditentukan oleh relasi kekuasaan dibandingkan kompetensi

(Aspinall et al. 2020). Akibatnya, profesionalitas pengelolaan koperasi menjadi rendah dan sulit bersaing dengan ritel modern yang memiliki sistem manajemen yang lebih terstruktur.

Selain itu, KDMP juga belum mampu menjalankan perannya sebagai wadah penguatan UMKM lokal. Dalam banyak kasus, produk yang dijual di koperasi tidak berbeda dengan yang tersedia di minimarket, bahkan didominasi oleh produk-produk dari perusahaan besar. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal kebijakan yang ingin mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Kritik terhadap kondisi ini juga muncul dalam berbagai pemberitaan yang menilai bahwa koperasi desa belum optimal dalam menyerap produk UMKM (Saputra, 2026)

Dari sisi operasional, KDMP juga menghadapi berbagai keterbatasan yang membuatnya kurang kompetitif. Jam operasional yang tidak menentu, keterbatasan stok barang, serta pelayanan yang belum profesional menjadi kendala utama dalam menarik minat konsumen. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung lebih memilih ritel modern yang menawarkan kepastian layanan dan ketersediaan produk. Fenomena ini menunjukkan bahwa KDMP belum mampu memenuhi ekspektasi pasar dalam hal efisiensi dan kenyamanan (Putri, 2025).

Lebih lanjut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KDMP juga masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang menganggap koperasi ini sebagai program pemerintah yang bersifat sementara dan belum terbukti keberhasilannya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam koperasi desa menjadi indikator bahwa KDMP belum berhasil membangun legitimasi sebagai institusi ekonomi yang kuat. Hal ini juga diperkuat oleh laporan yang menyebutkan bahwa masih banyak koperasi desa yang belum aktif beroperasi (Huda, 2026)

Kritik terhadap Intervensi Pemerintah dalam Implementasi KDMP

Intervensi pemerintah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur pasar yang semakin didominasi oleh ritel modern. Namun, dalam praktiknya, intervensi ini justru menimbulkan sejumlah persoalan baru, terutama terkait dengan potensi distorsi pasar di tingkat lokal. Kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern di desa, misalnya, berpotensi mengurangi tingkat persaingan yang sehat dan pada akhirnya merugikan konsumen karena pilihan menjadi lebih terbatas (Kontan, 2026)

Salah satu kritik utama terhadap kebijakan ini adalah potensi munculnya monopoli baru yang justru berasal dari institusi yang didukung negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengingatkan bahwa pemberian perlindungan berlebihan terhadap koperasi desa dapat menciptakan dominasi pasar baru yang tidak kalah problematis dibandingkan korporasi swasta. Dalam konteks ini, KDMP berpotensi menjadi satu-satunya saluran distribusi barang di desa jika ritel modern dibatasi secara ketat (KPPU, 2025).

Selain itu, intervensi negara yang terlalu besar juga berpotensi melemahkan prinsip dasar koperasi itu sendiri. Secara konseptual, koperasi seharusnya tumbuh secara partisipatif dan berbasis kebutuhan anggota. Namun, dalam kasus KDMP, pembentukan

koperasi cenderung dilakukan secara top-down melalui instruksi pemerintah, sehingga mengurangi ruang partisipasi masyarakat. Kondisi ini berisiko menjadikan koperasi sebagai proyek administratif semata, bukan sebagai gerakan ekonomi yang benar-benar hidup di masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025).

Dari perspektif efisiensi ekonomi, intervensi ini juga dapat menghambat inovasi dan daya saing. Ritel modern berkembang karena mampu menciptakan sistem distribusi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Sebaliknya, KDMP yang mendapatkan perlindungan negara justru berpotensi tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan karena tidak menghadapi tekanan kompetitif yang cukup. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa intervensi negara yang berlebihan dapat mengurangi efisiensi pasar (Stiglitz, 2010).

Lebih lanjut, implementasi KDMP juga menunjukkan adanya kecenderungan politisasi di tingkat lokal. Keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan koperasi membuka peluang bagi praktik patronase, di mana distribusi sumber daya ekonomi tidak sepenuhnya didasarkan pada mekanisme pasar, melainkan pada relasi kekuasaan. Fenomena ini memperkuat temuan dalam studi politik lokal di Indonesia yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi sering kali tidak terlepas dari kepentingan elite lokal (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dari sisi masyarakat, keterbatasan kinerja KDMP juga memperkuat kritik terhadap kebijakan ini. Banyak masyarakat yang tetap memilih ritel modern atau warung tradisional karena dianggap lebih stabil, lengkap, dan dapat diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui KDMP belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam preferensi konsumen. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan ini justru dianggap membatasi akses masyarakat terhadap layanan ritel yang lebih berkualitas (Kontan, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah melalui KDMP, meskipun bertujuan untuk melindungi ekonomi lokal, justru berpotensi menciptakan distorsi pasar, melemahkan prinsip koperasi, serta membuka peluang bagi munculnya monopoli baru. Tanpa perbaikan dalam desain kebijakan dan implementasi, KDMP berisiko tidak hanya gagal menjadi solusi, tetapi juga menjadi sumber permasalahan baru dalam sistem ekonomi pedesaan.

Dampak Buruk Kemunculan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Kemunculan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan negara tidak hanya membawa harapan terhadap penguatan ekonomi desa, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif dalam implementasinya. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah potensi terjadinya distorsi pasar di tingkat lokal. Ketika negara memberikan dukungan dan perlindungan khusus terhadap KDMP, seperti pembatasan ekspansi ritel modern, maka struktur pasar menjadi tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena pilihan menjadi terbatas dan kualitas layanan tidak terdorong untuk meningkat (Tarumingkeng, 2024)

Selain itu, keberadaan KDMP juga berpotensi menciptakan monopoli baru di pedesaan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengingatkan bahwa koperasi yang mendapatkan perlindungan berlebihan dari negara dapat berkembang menjadi aktor dominan yang menguasai distribusi barang di tingkat lokal. Dalam kondisi ini, KDMP tidak lagi berfungsi sebagai alternatif ekonomi, melainkan sebagai pengganti dominasi yang sebelumnya dipegang oleh ritel modern (KPPU, 2026)

Dampak lain yang cukup signifikan adalah munculnya praktik patronase dan nepotisme dalam pengelolaan koperasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, rekrutmen pengelola KDMP sering kali tidak berbasis pada kompetensi, melainkan pada kedekatan dengan perangkat desa. Hal ini membuka peluang bagi elite lokal untuk mengontrol sumber daya ekonomi yang seharusnya dikelola secara kolektif. Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam studi politik lokal di Indonesia yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi sering kali tidak terlepas dari relasi kekuasaan (Aspinall et al. 2020).

Selain itu, KDMP juga berpotensi menciptakan ketergantungan baru terhadap negara. Koperasi yang seharusnya bersifat mandiri justru menjadi bergantung pada bantuan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan maupun regulasi. Kondisi ini menghambat kemandirian ekonomi desa dalam jangka panjang, karena keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan pemerintah. Kritik terhadap hal ini juga muncul dalam berbagai analisis ekonomi yang menilai bahwa intervensi negara yang terlalu besar dapat mengurangi efisiensi dan inovasi (Stiglitz, 2010).

Dari sisi ekonomi masyarakat, keberadaan KDMP juga belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Banyak koperasi yang belum mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara konsisten. Akibatnya, masyarakat tetap memilih ritel modern atau warung tradisional yang lebih dapat diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa KDMP belum mampu membangun kepercayaan masyarakat sebagai institusi ekonomi yang efektif (Kontan, 2026)

Kegagalan KDMP dalam mengintegrasikan produk UMKM juga menjadi salah satu dampak negatif yang cukup serius. Meskipun secara normatif bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal, dalam praktiknya banyak koperasi yang justru menjual produk-produk dari perusahaan besar. Hal ini tidak hanya mengurangi peluang bagi pelaku UMKM, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan tujuan awalnya (Redaksi, 2026)

Pembahasan

Analisis Dominasi Ritel Modern dan Kaitannya dengan Teori Pasar/Kapitalisme

Ekspansi ritel modern ke wilayah pedesaan Indonesia bukan sekadar fenomena bisnis biasa, melainkan cerminan dari logika kapitalisme yang bekerja secara sistematis dalam memperluas jangkauan akumulasi modal. Minimarket waralaba seperti Alfamart dan Indomaret telah masuk ke pelosok desa dengan membawa sistem distribusi yang efisien, standar pelayanan yang terukur, serta kapasitas modal yang jauh melampaui warung kelontong tradisional. Dalam perspektif (Hadiz, 2010), proses semacam ini merupakan bagian dari penetrasi kapital yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga

berdimensi politik, karena merekonfigurasi relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya di tingkat lokal.

Fenomena ini sejalan pula dengan konsep "revolusi supermarket" yang menggambarkan bagaimana ritel modern secara progresif menggantikan fungsi distribusi yang sebelumnya dipegang oleh aktor-aktor lokal. Revolusi ini tidak berlangsung secara kekerasan, melainkan melalui mekanisme pasar: ritel modern menawarkan harga yang lebih transparan, variasi produk yang lebih beragam, serta pengalaman berbelanja yang lebih nyaman. Konsumen, termasuk masyarakat desa, secara rasional cenderung beralih ke pilihan yang memberikan utilitas lebih besar (Reardon & Hopkins 2006).

Namun, dari perspektif (Stiglitz, 2010), pasar yang tampak bebas dan kompetitif ini sesungguhnya mengandung ketidaksempurnaan struktural yang serius. Ketimpangan dalam akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi antara korporasi ritel besar dan pelaku usaha kecil menciptakan persaingan yang tidak setara (*uneven playing field*). Ritel modern mampu menekan harga pemasok, memanfaatkan skala ekonomi, dan menginvestasikan keuntungan dalam ekspansi lanjutan—sesuatu yang mustahil dilakukan oleh warung kelontong. Dalam logika ini, dominasi ritel modern bukanlah hasil dari keunggulan kompetitif murni, melainkan cerminan dari kekuatan struktural kapital yang bekerja secara asimetris.

Lebih jauh, dominasi ini juga berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat desa secara signifikan. Preferensi konsumen yang semula berbasis pada hubungan sosial dan kepercayaan dengan pemilik warung lokal perlahan bergeser ke orientasi efisiensi dan kenyamanan yang ditawarkan ritel modern. Perubahan ini, sebagaimana diidentifikasi oleh (Euromonitor, 2020) tidak hanya mencerminkan adaptasi ekonomi, tetapi juga transformasi nilai sosial yang lebih dalam: modernitas mulai diidentifikasi dengan praktik berbelanja di minimarket. Inilah yang menjadikan dominasi ritel modern bukan sekadar dominasi pasar, tetapi juga dominasi kultural.

Analisis Intervensi Negara melalui KDMP: Koreksi Pasar atau Dominasi Baru?

Kemunculan kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 merupakan respons negara terhadap ketimpangan struktural yang ditimbulkan oleh ekspansi ritel modern. Secara normatif, intervensi ini dapat dibaca sebagai upaya koreksi pasar (*market correction*) untuk melindungi ekonomi desa dari dominasi kapital besar. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, peran negara sebagai penyeimbang kekuatan pasar memang memiliki justifikasi yang kuat, terutama ketika pasar gagal mendistribusikan manfaat secara adil (Stiglitz 2010)

Namun, ketika implementasi KDMP dikaji lebih dalam, terdapat indikasi yang mengkhawatirkan bahwa intervensi ini justru berpotensi melahirkan dominasi baru—kali ini bukan dari korporasi swasta, melainkan dari institusi yang didukung negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU, 2025) telah mengingatkan bahwa pemberian proteksi berlebihan kepada KDMP, termasuk melalui pembatasan ekspansi ritel modern, dapat menciptakan monopoli baru di pedesaan. Alih-alih memperluas pilihan masyarakat, kebijakan ini berpotensi menyempitkannya.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks jika dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Secara konseptual, koperasi seharusnya lahir dari inisiatif

anggota, tumbuh secara partisipatif, dan dikelola untuk kepentingan kolektif. Sebaliknya, KDMP dibentuk melalui instruksi dari atas (top-down), dengan target pembentukan yang ambisius namun tidak disertai kesiapan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini menjadikan KDMP lebih menyerupai proyek administratif pemerintah daripada gerakan ekonomi rakyat yang sejati. Sebagaimana diungkap dalam kajian Kementerian Koperasi dan UKM (2025), pembentukan koperasi yang dipaksakan tanpa penguatan kelembagaan justru rentan menjadi simbolik dan tidak fungsional.

Dengan demikian, pertanyaan apakah KDMP merupakan koreksi pasar atau dominasi baru tidak memiliki jawaban yang hitam putih. Dalam tataran normatif dan retorik, ia adalah koreksi pasar. Namun dalam tataran praktis dan struktural, KDMP berisiko menjadi bentuk baru dari dominasi yang menggantikan korporasi ritel dengan aparat negara dan elite desa sebagai aktor pengendali distribusi ekonomi lokal.

Konsep Ekonomi Politik: Relasi Negara, Pasar, dan Masyarakat Desa

Untuk memahami dinamika KDMP secara menyeluruh, diperlukan kerangka analisis ekonomi politik yang menempatkan relasi antara negara, pasar, dan masyarakat desa sebagai fokus utama kajian. Ketiganya tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam medan kekuasaan yang kompleks dan asimetris.

Dalam relasi negara-pasar, kebijakan KDMP mencerminkan upaya negara untuk merebut kembali ruang yang telah diambil alih oleh korporasi ritel modern. Namun, strategi intervensi ini tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan. (Hadiz 2010) mengingatkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ekonomi yang diklaim pro-rakyat kerap menjadi arena bagi elite untuk mengamankan posisi dan sumber daya. Dalam konteks KDMP, keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan koperasi membuka peluang bagi praktik patronase yang telah lama mengakar dalam sistem politik lokal Indonesia (Aspinall et al. 2020).

Dalam relasi negara-masyarakat desa, implementasi KDMP yang bersifat top-down menunjukkan adanya defisit partisipasi yang serius. Masyarakat desa tidak dilibatkan secara substansial dalam perencanaan maupun pengelolaan koperasi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap KDMP tetap rendah, dan koperasi gagal membangun basis sosial yang kuat sebagai fondasi keberlanjutannya. (Kontan, 2026) mencatat bahwa masih banyak koperasi desa yang belum aktif beroperasi, yang menjadi indikator jelas dari lemahnya legitimasi sosial KDMP di mata masyarakat.

Dalam relasi pasar-masyarakat desa, pergeseran konsumsi ke ritel modern menunjukkan bahwa masyarakat desa bukanlah aktor pasif yang semata-mata menjadi korban dominasi kapital. Mereka membuat pilihan rasional berdasarkan ketersediaan, harga, kenyamanan, dan kepercayaan. Fakta bahwa masyarakat tetap lebih memilih ritel modern atau warung tradisional dibandingkan KDMP mencerminkan respons pasar yang jujur terhadap kinerja institusi yang belum mampu memenuhi ekspektasi mereka (Kontan, 2025). Dalam hal ini, suara pasar — dalam bentuk pilihan konsumen — menjadi cermin yang paling jujur bagi kegagalan implementasi kebijakan.

Konsep Koperasi vs. Kapitalisme Ritel: Posisi KDMP dalam Sistem Ekonomi

Perdebatan antara koperasi dan kapitalisme ritel pada hakikatnya adalah perdebatan tentang logika pengorganisasian ekonomi: apakah aktivitas ekonomi harus diorganisasi untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal (kapitalisme ritel), ataukah untuk memenuhi kebutuhan anggota secara kolektif (koperasi). Keduanya tidak hanya berbeda dalam tujuan, tetapi juga dalam struktur insentif, tata kelola, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Ritel modern beroperasi dalam logika kapitalisme yang terstandarisasi: efisiensi operasional diprioritaskan, keputusan diambil secara terpusat, dan keberhasilan diukur dari pertumbuhan omzet dan margin keuntungan. Sistem ini sangat efektif dalam hal distribusi barang, namun ia juga mereproduksi ketimpangan dengan mengalirkan surplus ekonomi ke pusat (korporasi induk) dan meminimalkan retensi nilai tambah di tingkat desa.

Koperasi, dalam teorinya, menawarkan alternatif yang lebih inklusif: surplus tetap berada di tangan anggota, keputusan diambil secara demokratis, dan orientasi utamanya adalah kesejahteraan kolektif. Namun, KDMP sebagaimana termanifestasi dalam realitasnya belum mencerminkan ideal koperasi tersebut. Koperasi ini dibentuk tidak berdasarkan kesadaran kolektif anggota, dikelola oleh individu yang ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan aparat desa, dan dalam banyak kasus justru menjual produk-produk korporasi besar alih-alih produk UMKM lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Dalam kondisi ini, KDMP tidak berposisi sebagai antitesis dari kapitalisme ritel, melainkan sebagai variannya yang dibalut narasi pro-rakyat.

Secara struktural, KDMP juga menghadapi tantangan kompetensi yang fundamental. Untuk bersaing dengan ritel modern yang telah memiliki sistem rantai pasok yang matang, teknologi manajemen inventori, dan tim profesional, koperasi desa membutuhkan investasi besar dalam kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan modal kerja. Tanpa fondasi ini, KDMP akan selalu berada dalam posisi inferior secara kompetitif, dan proteksi negara hanya akan memperpanjang keberadaannya tanpa meningkatkan efektivitasnya.

Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Temuan tentang Tekanan Ritel Modern terhadap Usaha Kecil

Temuan dalam penelitian ini mengenai dampak ritel modern terhadap pelaku usaha kecil di pedesaan konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah mendokumentasikan fenomena serupa di berbagai negara berkembang. (Reardon & Hopkins, 2006) dalam kajian seminalnya tentang revolusi supermarket di Asia dan Afrika menunjukkan bahwa ekspansi ritel modern secara sistematis mengikis pangsa pasar usaha kecil, khususnya dalam kategori produk konsumsi harian. Mekanisme yang bekerja meliputi kompetisi harga yang tidak seimbang, kekuatan tawar yang asimetris terhadap pemasok, serta kemampuan ritel modern untuk memengaruhi preferensi konsumen melalui promosi dan pengalaman berbelanja.

Di konteks Indonesia, kehadiran minimarket waralaba di tingkat kecamatan berkorelasi negatif dengan kelangsungan usaha warung kelontong tradisional dalam jangka menengah (Gunawan, Prasetyo, & Hidayat, 2022). Temuan ini memperkuat

argumen bahwa tekanan ritel modern bukan hanya kompetitif dalam artian biasa, melainkan struktural—ia mengubah seluruh ekologi ekonomi lokal dengan cara yang sulit dibalikkan. Penelitian ini selaras dengan temuan tersebut, di mana perubahan pola konsumsi masyarakat desa menunjukkan pergeseran yang bersifat kumulatif dan cenderung ireversibel.

KDMP sebagai Respons Negara: Apa yang Dikatakan Literatur?

Dalam konteks respons kebijakan negara terhadap dominasi ritel modern, penelitian terdahulu menunjukkan gambaran yang beragam. Di beberapa negara, regulasi yang membatasi ekspansi ritel modern terbukti efektif dalam melindungi usaha kecil jika disertai dengan kebijakan penguatan kapasitas yang komprehensif. Namun, intervensi yang bersifat parsial—hanya melindungi tanpa memperkuat—cenderung menghasilkan inefisiensi tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal.

Dari sisi koperasi sebagai instrumen kebijakan, literatur ekonomi kelembagaan menunjukkan bahwa koperasi yang berhasil umumnya memiliki tiga karakteristik: lahir dari inisiatif anggota, memiliki tata kelola yang demokratis dan transparan, serta didukung oleh kapasitas manajerial yang memadai. Ketiga syarat ini, sebagaimana teridentifikasi dalam penelitian ini, belum sepenuhnya terpenuhi dalam implementasi KDMP. Hal ini konsisten dengan temuan (Huda, 2026) yang menilai bahwa KDMP masih membutuhkan penguatan SDM secara mendasar agar dapat berfungsi secara efektif dan kompetitif.

Apakah KDMP Solusi untuk Perekonomian Desa?

Pertanyaan apakah KDMP merupakan solusi yang tepat bagi perekonomian desa harus dijawab dengan mengakui kompleksitas masalah yang dihadapi. Secara potensial, KDMP memiliki relevansi sebagai instrumen kebijakan: koperasi yang berfungsi dengan baik dapat menjadi kanal distribusi produk lokal, penyerap produk UMKM, dan sumber lapangan kerja di tingkat desa. Namun, potensi ini hanya dapat terealisasi jika implementasinya memenuhi syarat-syarat kelembagaan yang fundamental.

Dalam kondisi saat ini, bukti empiris menunjukkan bahwa KDMP belum dapat diandalkan sebagai solusi yang efektif. Keterbatasan operasional yang meliputi jam buka yang tidak konsisten, keterbatasan stok barang, dan kualitas layanan yang di bawah standar menjadikan KDMP tidak kompetitif di mata konsumen. Masyarakat yang secara rasional membandingkan antara KDMP, minimarket, dan warung tradisional akan cenderung memilih alternatif yang memberikan kepastian dan nilai lebih baik. Fakta bahwa banyak koperasi desa belum aktif beroperasi (R. Gunawan, Wiguna, & Purnama, 2022) menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan.

Lebih jauh, KDMP juga belum berhasil menjalankan misi utamanya dalam memberdayakan UMKM lokal. Jika produk yang dijual di koperasi didominasi oleh merek-merek nasional dari perusahaan besar, maka koperasi hanya menggandakan fungsi minimarket dengan efisiensi yang lebih rendah. Dalam kondisi ini, KDMP tidak menambah nilai bagi ekosistem ekonomi desa, melainkan hanya menambah aktor distribusi yang tidak kompetitif. Kritik ini relevan dan harus dijadikan bahan evaluasi kebijakan yang serius oleh pemangku kepentingan terkait.

Meski demikian, menolak KDMP secara keseluruhan juga bukan pilihan yang bijak. Jika desain kebijakan diperbaiki dengan menekankan partisipasi anggota yang genuine, rekrutmen pengelola berbasis merit, penguatan kapasitas manajerial yang terencana, dan integrasi nyata dengan produk UMKM lokal maka koperasi desa berpotensi menjadi instrumen yang bermakna dalam membangun ekonomi desa yang lebih inklusif. Yang diperlukan bukan hanya retorika kebijakan, melainkan komitmen implementasi yang konsisten dan terukur.

Potensi Masalah Baru: Monopoli Negara dan Distorsi Pasar

Salah satu risiko terbesar yang muncul dari implementasi KDMP adalah potensi terjadinya monopoli yang dikelola atau difasilitasi oleh negara. Ketika KDMP diberikan berbagai keistimewaan regulatoris—termasuk pembatasan terhadap ekspansi ritel swasta—dan pada saat yang sama belum mampu beroperasi secara efisien, maka yang terjadi bukanlah perlindungan ekonomi desa, melainkan penciptaan monopoli yang tidak produktif (KPPU, 2026). Secara eksplisit telah mengingatkan risiko ini, menekankan bahwa monopoli yang disponsori negara tidak kurang problematisnya dibandingkan monopoli swasta.

Distorsi pasar yang ditimbulkan oleh proteksi berlebihan terhadap KDMP juga berpotensi merugikan konsumen secara langsung. Dalam pasar yang terproteksi dan tidak kompetitif, tidak ada mekanisme yang mendorong peningkatan kualitas layanan atau efisiensi harga. Konsumen desa akhirnya terjebak dalam pilihan yang terbatas dengan kualitas yang tidak terstandarisasi—kondisi yang jauh lebih buruk dibandingkan persaingan terbuka antara ritel modern dan warung tradisional (Kontan, 2026)

Persoalan praktik patronase yang mengikuti implementasi KDMP juga tidak dapat diabaikan. Temuan bahwa rekrutmen pengelola koperasi lebih didasarkan pada kedekatan dengan perangkat desa daripada kompetensi. (Aspinall et al. 2020) mencerminkan patologi lama dalam tata kelola lokal Indonesia: sumber daya publik yang seharusnya dikelola untuk kepentingan kolektif rentan dikapitulasi oleh elite yang memiliki akses pada jaringan kekuasaan. Dalam konteks ini, KDMP tidak hanya berpotensi gagal secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memperkuat praktik-praktik koruptif yang selama ini menjadi hambatan bagi pembangunan desa.

Risiko lain yang patut dicermati adalah terciptanya ketergantungan baru terhadap negara. Koperasi yang sejak awal bergantung pada subsidi, regulasi protektif, dan instruksi dari pemerintah akan kesulitan untuk berdiri mandiri ketika dukungan tersebut berkurang atau ditarik. Hal ini menghasilkan institusi yang secara struktural fragile: eksistensinya ditopang bukan oleh kinerja ekonomi, melainkan oleh kehendak politik yang bersifat fluktuatif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan institusi ekonomi yang seharusnya dibangun atas dasar nilai tambah dan kepercayaan anggota.

Implikasi Jangka Panjang terhadap Ekonomi Desa

Dalam perspektif jangka panjang, implementasi KDMP yang tidak dibenahi akan membawa serangkaian implikasi yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi desa secara struktural. Pertama, hilangnya warung kelontong tradisional yang terdesak oleh ritel modern tidak serta-merta akan digantikan oleh KDMP yang fungsional. Jika keduanya

warung tradisional dan koperasi tidak mampu bersaing, maka desa akan semakin bergantung pada jaringan distribusi korporasi besar yang tidak memiliki akar dan komitmen lokal (Fiola Surya Dwi Fahmi & Hendra Riofita, 2025)

Kedua, kegagalan KDMP dalam mengintegrasikan produk UMKM lokal berimplikasi pada terhambatnya pengembangan kapasitas produktif desa. Jika saluran distribusi lokal tidak mampu menyerap produk petani dan pengusaha kecil desa, maka nilai tambah dari aktivitas ekonomi lokal akan terus bocor ke luar desa. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan antara desa dan kota, serta antara pelaku usaha kecil dan korporasi besar.

Ketiga, politisasi KDMP melalui praktik patronase dan nepotisme berpotensi merusak kepercayaan sosial (social trust) yang merupakan modal dasar pembangunan komunitas. Ketika institusi ekonomi dipersepsikan sebagai alat distribusi kekuasaan daripada instrumen kesejahteraan bersama, maka partisipasi masyarakat akan melemah dan modal sosial kolektif yang dibutuhkan untuk pembangunan desa yang berkelanjutan akan terkikis.

Meski demikian, kondisi ini bukan tanpa harapan. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dalam mereformasi implementasi KDMP dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (good governance), penguatan kapasitas sumber daya manusia, rekrutmen berbasis merit, serta integrasi nyata dengan ekosistem UMKM lokal, maka koperasi desa berpotensi menjadi fondasi yang kuat bagi ekonomi desa yang mandiri dan inklusif. Namun, transformasi ini membutuhkan komitmen kebijakan yang melampaui sekadar retorika dan instruksi administratif—ia membutuhkan perubahan paradigma dalam memandang peran negara, pasar, dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa.

Akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh para pembuat kebijakan adalah: apakah KDMP dirancang untuk benar-benar memberdayakan masyarakat desa, ataukah ia merupakan instrumen legitimasi politik yang menggunakan narasi pemberdayaan untuk tujuan-tujuan lain? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah KDMP akan menjadi babak baru dalam pemberdayaan ekonomi desa, atau sekadar episode lain dalam panjangnya sejarah kebijakan yang baik di atas kertas namun gagal dalam pelaksanaan.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, ekspansi ritel modern di pedesaan tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih berorientasi pada efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga menciptakan ketergantungan terhadap jaringan distribusi korporasi besar serta melemahkan peran ekonomi lokal, sementara implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan menjadi alternatif justru masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya partisipasi masyarakat, serta adanya indikasi praktik patronase. Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa intervensi negara melalui pembatasan ritel modern dan pembentukan koperasi belum tentu menghasilkan keseimbangan pasar, bahkan berpotensi menimbulkan distorsi dan dominasi baru jika tidak diiringi dengan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, secara praktis pemerintah perlu memfokuskan kebijakan pada penguatan kapasitas kelembagaan KDMP melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan sistem

manajemen profesional, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel agar koperasi mampu bersaing secara substantif, bukan sekadar dilindungi regulasi. Selain itu, penting untuk mendorong integrasi produk UMKM lokal dalam rantai distribusi koperasi guna memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi empiris berbasis data lapangan yang lebih mendalam guna menguji efektivitas implementasi KDMP di berbagai daerah serta menganalisis secara kuantitatif dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan struktur persaingan pasar di pedesaan.

Referensi

- Ade, Gusti, and Nur Fatimah. 2025. "No Title" 8 (1): 189–97.
- Aspinall, By Edward, Ward Berenschot, New York, and Stephen Marks. 2020. "Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of in Indonesia" 4918. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1742957>.
- Euromonitor. 2020. "Introduction Global Outlook Leading Companies and Brands Key Trends for Consumer Health During Coronavirus Market Snapshots," no. October.
- Fiola Surya Dwi Fahmi, and Hendra Riofita. 2025. "Kebijakan Ekonomi Publik Intervensi Pemerintah Terhadap Eksternalitas Dan Ketimpangan Pendapatan." *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis* 4 (2): 143–53. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4052>.
- Gunawan, A, B Prasetyo, and R Hidayat. 2022. "Dampak ekspansi minimarket waralaba terhadap kelangsungan usaha warung kelontong di tingkat kecamatan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 37 (2): 145–63.
- Gunawan, Rizky, Aldy Wiguna, and Rahmi Purnama. 2022. "TANTANGAN UMKM MENGHADAPI PERUSAHAAN RETAIL MODERN DI ERA DISRUPSI INDOMARET DAN ALFAMART (STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU)." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1 (June):13–26. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.459>.
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, California: Stanford University Press. <https://archive.org/>.
- Huda. 2026. "Keterbatasan SDM dan Permodalan Hambat Operasional KDMP." *Kalamanthana.id*, 2026.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Koperasi Desa Merah Putih: Gotong royong wujudkan kemandirian ekonomi rakyat.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). Laporan evaluasi implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Program Koperasi Desa Merah Putih..
- Kontan. 2025. "Ekonom Ini Ingatkan Sederet Risiko Koperasi Desa Merah Putih." *Kontan.co.id*, 2025. <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-ini-ingatkan-sederet-risiko-koperasi-desa-merah-putih>.
- — —. 2026. "Minimarket Akan Dibatasi Masuk Desa Demi KDMP, Pengamat: Bertentangan UU." *Kontan.co.id*, 2026. <https://nasional.kontan.co.id/news/minimarket-akan-dibatasi-masuk-desa-demi-kdmp-pengamat-bertentangan-uu>.
- KPPU. 2026. "KPPU Dukung Penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Siap Kawal Iklim Usaha Sehat di Desa." Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. <https://kppu.go.id/berita/kppu-dukung-penguatan-koperasi-desa-merah-putih-siap-kawal-iklim-usaha-sehat-di-desa>.
- Kurniawan, Reza. 2025. "Reposisi Peran Koperasi Desa Merah Putih: Pendekatan Manajemen Strategik dalam Menakar Keberlanjutan." *Reza Dwi Kurniawan* 1 (1): 1.
- Nurjannah, Ika Wisudawaty. 2025. "Jurnal Pendidikan Ekonomi," 158–67.
- Putri, Rizky Trisna. 2025. "Peluang dan Ancaman Koperasi Desa Merah Putih." Universitas Negeri Surabaya.
- Reardon, Thomas, and Rose Hopkins. 2006. "The Supermarket Revolution in Developing Countries: Policies to Address Emerging Tensions Among Supermarkets, Suppliers and Traditional Retailers." *The European Journal of Development Research* 18 (4): 522–45. <https://doi.org/10.1080/09578810601070613>.
- Reardon, Thomas, and C Peter Timmer. 2012. "The Economics of the Food System Revolution." <https://doi.org/10.1146/annurev.resource.050708.144147>.
- Redaksi, Tim. 2026. "KDMP Dinilai Perlu Jaga Keseimbangan, UMKM Khawatir Terdesak di Desa." *Kabarkoperasi.id*, 2026. <https://kabarkoperasi.id/kdmp-dinilai-perlu-jaga-keseimbangan-umkm-khawatir-terdesak-di-desa/>.

-
- Rusno, Rusno. 2008. "DAMPAK PESATNYA MINI MARKET WARALABA TERHADAP USAHA KECIL (JENIS RITEL)." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 4 (October). <https://doi.org/10.21067/jem.v4i3.235>.
- Saptati, Reni D I. 2025. "Koperasi Desa Merah Putih: Gotong Royong Wujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/koperasi-desa-merah-putih-gotong-royong-wujudkan-kemandirian-ekonomi-rakyat>.
- Saputra, Rizki Sandi. 2026. "Ekonom Kritik Anggaran Jumbo MBG dan KDMP: Efisiensi Tak Efektif Jika Belanja Besar Tak Dipangkas." *Tribunnews*, 2026. <https://www.tribunnews.com/bisnis/7813496/ekonom-kritik-anggaran-jumbo-mbg-dan-kdmp-efisiensi-tak-efektif-jika-belanja-besar-tak-dipangkas>.
- Stiglitz, Joseph E. 2010. *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. New York: W.W. Norton & Company. <https://archive.org/>.
- Sugiyono. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://archive.org/details/buku-metode-penelitian-sugiyono>.
- Tarumingkeng, Prof ir Rudy C. 2024. "Mengapa Koperasi Di Indonesia Kurang Berkembang?," 1–18.